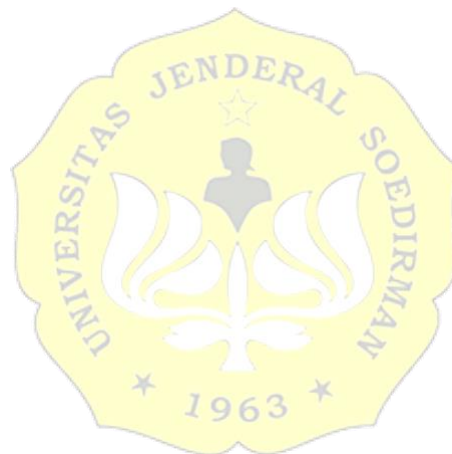


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Dye, T. R. (1975). *Understanding Public Policy* (2nd ed.). Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
- Edward III, G. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Edwards, G. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Thrid World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kurniadin, D., & Machali, I. (2016). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Thrid Edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. (2016, Agustus). Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 16, Vol. I*, hal. 7.
- Purwanto, E. A., & Sulistyawati, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ripley, R. B. (1985). *Policy Analysis in Political Sciences*. Chicago: Nelson-Hall Inc.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences* 4, 197-209.

- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukur, A. M. (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua*. Yogyakarta: CAPS.



Jurnal dan Skripsi:

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga*, Vol 2 No.1, 204-216.
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal. Kebijakan dan Manajemen Publik FISIP Universitas Airlangga*, Vol. 5, No. 3.
- Fajri, H. Y., & Purnaweni, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal. Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro*, Vol. 7, No. 4, 208-215.
- Gellani. (2018). Pengalihan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi. Program Kekhususan Hukum Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Gunawan, A., Pitoewas, B., & Yanzi, H. (2018). Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri di Kota Bandar Lampung terhadap Pengalihan Pengelolaan Menengah. *Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Lampung*, Vol 7, No 4.
- Harun, H. (2018). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Studi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *IALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial UNIRA Malang*, Vol. 3 No. 1, 33-54.
- Nasution, M. (2016, Agustus). Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Edisi 16, Vol. I, hal. 7.
- Prasetyo, I. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi (Studi Kasus di Kota Blitar). *Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Saputro, A., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNESA*, Vol 6, No 5.
- Sendhikasari, D. (2016). Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VIII, No. 07/1/P3DI/April/2016, 19.

Rizki, S. F. (2017). Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus: Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 2, pp. 171-180.

Ulum, A. N. (2017). Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Skripsi. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015.